CASCADING KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GOWA

Level Kinerja | Komponen Perencanaan dan Kinerja Jabatan

Kinerja Strategis

Tujuan OPD
Indikator Kinerja Utama
Kinerja Jabatan

Sasaran Strategis OPD
Indikator Kinerja Utama
Kinerja Jabatan

Meningkatkan pertumbuhan nilai investasi
IK: Persentase peningkatan investasi
Kepala DPMPTSP

Meningkatnya nilai investasi
IK: Nilai investasi
Kepala DPMPTSP

Kinerja Taktikal

Sasaran Program
Indikator Kinerja
Kinerja Jabatan
Nama Program

Terciptanya iklim usaha yang kondusif
IK: Persentase peningkatan jumlah investor
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Meningkatnya kegiatan promosi penanaman modal
IK: Persentase pelaku usaha baru yang memiliki perizinan
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku
IK: Persentase pelaku usaha yang mematuhi peraturan pelaksanaan penanaman modal
Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat
IK: Nilai indeks kepuasan masyarakat
IK: Persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu
IK: Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti tepat waktu
Sekretaris Dinas
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Pelayanan Penanaman Modal

Tersedianya informasi penanaman modal
IK: Persentase ketersediaan informasi yang valid
Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
Program Pengenelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kinerja Operasional

Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Kinerja Jabatan
Nama Kegiatan

Tersedianya akses kemudahan berusaha bagi pelaku usaha
IK: Persentase pelaku usaha yang mendapatkan fasilitas/insentif penanaman modal
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya pemetaan potensi investasi
IK: Persentase potensi pengembangan penanaman modal yang dipetakan
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Meningkatnya media promosi
IK: Caluupan media promosi
Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal bagi pelaku usaha
IK: Jumlah perusahaan penanaman modal yang memiliki LKPM
Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pelayanan perizinan dan non perizinan dilaksanakan dengan cepat/responsif
IK: Persentase layanan kepada masyarakat
Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

Menurunnya pengaduan masyarakat yang berulang
IK: Persentase pengaduan yang ditaruslan ke bidang terkait
Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan
Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota

Optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana
IK: Persentase sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan
Sekretaris Dinas
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Meningkatnya kompetensi SDM
IK: Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan tupoksinya
Sekretaris Dinas
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tersedianya data penanaman modal yang up to date
IK: Persentase data yang terupdate
Kepada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Gowa

Terlaksananya koordinasi dalam pengelolaan data penanaman modal
IK: Persentase data yang sinkron dengan SKPD teknis
Kepada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Gowa

Sasaran Sub Kegiatan
Indikator Kinerja
Kinerja Jabatan
Nama Sub Kegiatan

Tersedianya kebijakan daerah dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
IK: Jumlah peraturan daerah/promosi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal
Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Terlaksananya kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah
IK: Jumlah kesepakatan kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah
Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Tersedianya peta potensi dan peluang investasi
IK: Jumlah dokumen peta potensi investasi
Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Tersusunnya Peraturan Daerah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
IK: Jumlah peraturan daerah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya kegiatan pameran penanaman modal
IK: Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal
Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Tersedianya pedoman promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten
IK: Jumlah dokumen strategi promosi penanaman modal
Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

Terlaksananya monitoring dan evaluasi kepatuhan pelaku usaha
IK: Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dilakukan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan kepatuhan lapangan, hasil dilakukan evaluasi perizinan kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha
Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

Terlaksananya penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
IK: Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usaha
Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya

Terlaksananya bimbingan teknis / sosialisasi implementasi perizinan
IK: Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko
Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

Tersedianya pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik
IK: Jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan sistem perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik
Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Tersedianya dan terkelolanya layanan konsultasi terhadap perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik
IK: Jumlah pelaku usaha yang mengakses layanan konsultasi terhadap perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik
Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko

Terlaksananya tindaklanjut hasil monev laporan pengaduan
IK: Jumlah hasil monev laporan pengaduan yang ditindaklanjuti
Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan berusaha berbasis risiko

Tersedianya sarana prasarana pelayanan yang dibutuhkan
IK: Jumlah sarana prasarana yang diadakan
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terpeliharanya sarana prasarana pelayanan
IK: Jumlah sarana prasarana yang berfungsi dengan baik
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
IK: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Tersedianya data perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan
IK: Jumlah data perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan
Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Tersedianya format data yang telah diolah
IK: Jumlah data yang telah diolah
Analis Kebijakan Ahli Muda
Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Sasaran Kinerja Individu
Indikator Kinerja
Kinerja Jabatan

Tersedianya bahan penyusunan kebijakan daerah
IK: Jumlah bahan penyusunan kebijakan daerah
Pelaksana

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi penyusunan kebijakan daerah
IK: Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi penyusunan kebijakan daerah
Pelaksana

Tersedianya data pelaku usaha calon penerima manfaat
IK: Jumlah pelaku usaha calon penerima manfaat
Pelaksana

Terlaksananya koordinasi dengan SKPD terkait
IK: Jumlah laporan koordinasi
Pelaksana

Terlaksananya koordinasi dan pemetaan potensi dan peluang investasi
IK: Jumlah laporan koordinasi
Pelaksana

Tersedianya data pemetaan potensi dan peluang investasi
IK: Jumlah data pemetaan potensi dan peluang investasi
Pelaksana

Tersedianya bahan penyusunan perda
IK: Jumlah bahan penyusunan perda
Pelaksana

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi penyusunan perda
IK: Jumlah laporan koordinasi dan konsultasi penyusunan perda
Pelaksana

Tersedianya bahan pameran
IK: Jumlah bahan pameran
Pelaksana

Tersusunnya jadwal kesiksertaan kegiatan pameran
IK: Jumlah rencana kesiksertaan kegiatan pameran
Pelaksana

Tersedianya data publikasi
IK: Jumlah bahan promosi untuk publikasi
Pelaksana

Tersedianya media publikasi
IK: Jumlah media publikasi promosi
Pelaksana

Tersedianya data valid kegiatan usaha yang akan diawasi
IK: Jumlah kegiatan usaha yang akan diawasi
Pelaksana

Tersedianya data valid pelaku usaha yang memiliki permasalahan
IK: Jumlah pelaku usaha yang memiliki permasalahan
Pelaksana

Tersedianya data valid pelaku usaha yang akan dibina
IK: Jumlah pelaku usaha yang akan dibina
Pelaksana

Terinputnya data pemohon perizinan
IK: Jumlah pemohon perizinan
Pelaksana

Terinputnya data pelaku usaha yang melakukan konsultasi
IK: Jumlah pelaku usaha yang akan dikonsultasi
Pelaksana

Tersedianya dokumen laporan pengaduan
IK: Jumlah laporan pengaduan
Pelaksana

Terdataya rencana kebutuhan sarana prasarana pegawai
IK: Jumlah RKBMD
Pelaksana

Tersedianya data sarana prasarana yang memfunctikan pemeliharaan
IK: Jumlah laporan rencana pemeliharaan barang
Pelaksana

Terdataya pegawai yang akan/harus mengikuti diklat
IK: Jumlah laporan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM
Pelaksana

Terplahnya data dari sistem perizinan
IK: Jumlah data yang terplan
Pelaksana

Tersedianya data mentah dari sistem perizinan
IK: Jumlah data mentah
Pelaksana